



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN: KAJIAN EVALUATIF ATAS SISTEM
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM
(*Perspektif Manajemen Pendidikan Islam*)**

Meri Yulia^{1*}, Hamdi Abdul Karim²

^{1*,2} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

*Email: meriyulia1984@gmail.com, hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37081/jipdas.v6i3.5145>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif mekanisme evaluasi pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan dalam kerangka manajemen pendidikan Islam. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen strategis yang menentukan kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Tanpa pengawasan yang sistematis dan pertanggungjawaban yang akuntabel, alokasi dana pendidikan rawan terhadap pemborosan, penyalahgunaan, dan inefisiensi. Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai konsep dari literatur manajemen keuangan pendidikan, ekonomi pendidikan, dan kebijakan pembiayaan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi pengawasan biaya pendidikan yang efektif memerlukan sistem perencanaan anggaran yang terstruktur, mekanisme monitoring yang berkelanjutan, serta sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif kepada otoritas formal, tetapi juga berdimensi moral dan spiritual sebagai bentuk amanah dalam pengelolaan dana umat. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memperkuat peran partisipasi masyarakat dan komite sekolah dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Rekomendasi meliputi penguatan sistem pelaporan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan pendidikan, serta pemberdayaan komite sekolah sebagai representasi masyarakat dalam pengawasan pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci: Evaluasi Pengawasan, Pertanggungjawaban, Biaya Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam, Akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan suatu bangsa secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan memegang peranan yang sangat krusial karena menyentuh langsung kemampuan lembaga pendidikan dalam menyediakan layanan berkualitas bagi peserta didiknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Fattah (2000), pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

Namun demikian, ketersediaan dana pendidikan saja tidaklah cukup. Tantangan yang jauh lebih kompleks justru terletak pada bagaimana dana tersebut dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan. Doyle (dalam Danumihardja, 2004) menegaskan bahwa pengendalian biaya merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen yang menentukan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Tanpa mekanisme pengawasan yang sistematis, alokasi dana pendidikan rentan mengalami pemborosan, penyimpangan, bahkan penyelewengan yang merugikan berbagai pihak.

Di Indonesia, persoalan pembiayaan pendidikan semakin kompleks seiring dengan



diterapkannya otonomi daerah. Desentralisasi kewenangan pendidikan kepada pemerintah daerah membuka peluang yang lebih besar bagi pengelolaan yang kontekstual dan responsif, namun sekaligus menghadirkan risiko disparitas antar daerah dalam hal kualitas dan kuantitas pembiayaan pendidikan. Danumihardja (2004) dalam penelitiannya tentang manajemen keuangan sekolah pada era otonomi daerah menemukan berbagai tantangan dalam implementasi pengelolaan keuangan yang akuntabel di tingkat sekolah.

Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, pengelolaan biaya pendidikan bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan juga menyangkut dimensi moral dan spiritual. Setiap pengelola dana pendidikan di lembaga pendidikan Islam memikul amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada atasan dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Prinsip kejujuran (amanah), transparansi (syaffafiyah), dan keadilan (adalah) menjadi landasan etis yang harus mewarnai setiap aspek pengelolaan biaya pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep dan mekanisme evaluasi pengawasan biaya pendidikan; (2) menganalisis sistem pertanggungjawaban biaya pendidikan yang akuntabel; (3) membahas implikasi perspektif manajemen pendidikan Islam dalam pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan; serta (4) merumuskan rekomendasi untuk penguatan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan dapat didefinisikan sebagai seluruh upaya penggalan, pengalokasian, dan penggunaan dana untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Fattah (2000) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan mencakup biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost) yang keduanya berpengaruh pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan.

Latchanna dan Hussein (2007) dalam kajian mereka tentang ekonomi pendidikan mengidentifikasi beberapa kategori biaya pendidikan, yakni: biaya operasional (operational cost) yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari; biaya investasi (capital cost) yang diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur dan fasilitas; serta biaya pemeliharaan (maintenance cost) untuk menjaga keberlanjutan aset pendidikan. Pemahaman yang komprehensif terhadap kategori-kategori ini sangat penting untuk perencanaan anggaran yang efektif.

Dalam konteks kebijakan pembiayaan pendidikan berbasis formula, Caldwell, Levacic, dan Ross (1999) menekankan pentingnya mekanisme alokasi yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap sekolah. Formula funding yang baik tidak hanya memperhatikan jumlah siswa, tetapi juga faktor-faktor kontekstual seperti kondisi geografis, tingkat kemiskinan, dan kebutuhan khusus peserta didik. Pendekatan berbasis kebutuhan ini lebih berkeadilan dibandingkan sistem alokasi yang seragam.

Fiandi dan Junaidi (2022) mengidentifikasi berbagai sumber dana pendidikan yang meliputi: dana pemerintah pusat, dana pemerintah daerah, dana masyarakat, dana komite sekolah, dana hibah, serta pendapatan lain yang sah. Keberagaman sumber pendanaan ini menuntut sistem pengelolaan yang lebih kompleks namun sekaligus membuka peluang untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan.

B. Teori Pengawasan (Controlling) dalam Manajemen Pendidikan

Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), dan pengarahan (directing). Dalam konteks pembiayaan pendidikan, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Nasehatun (1999) menjelaskan bahwa sistem pengendalian yang efektif (budget and control) harus mencakup tiga komponen utama: pertama, standar atau target yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan; kedua, mekanisme pemantauan yang sistematis untuk mengukur realisasi terhadap standar; dan ketiga, tindakan korektif yang responsif ketika ditemukan penyimpangan. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan harus berjalan secara terintegrasi.



Doyle (dalam Parkinson dan Rustomji, 1993) mengemukakan bahwa pengendalian biaya yang efektif harus dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang struktur dan perilaku biaya. Identifikasi biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*) sangat penting untuk menentukan strategi efisiensi yang tepat. Kalkulasi biaya yang akurat merupakan prasyarat bagi pengawasan yang efektif.

Anwar (2004) dalam kajiannya tentang administrasi pendidikan menegaskan bahwa pengawasan dalam konteks pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan pengawasan dalam sektor bisnis. Selain aspek finansial, pengawasan pendidikan juga mencakup aspek pedagogis, kelembagaan, dan sosial-kultural. Oleh karena itu, evaluasi pengawasan biaya pendidikan harus dilakukan dalam kerangka yang holistik.

C. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dalam Pembiayaan Pendidikan

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban pengelola untuk memberikan laporan yang jelas, transparan, dan dapat diverifikasi tentang penggunaan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Harahap (1996) menekankan bahwa anggaran (*budget*) tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban yang mengikat para pengelola untuk bertindak sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Murnane (2001) dalam kajiannya tentang evaluasi investasi pendidikan menekankan pentingnya mengukur dampak dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Pertanggungjawaban yang baik tidak cukup hanya melaporkan jumlah dana yang telah dikeluarkan, tetapi juga harus mampu menunjukkan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dari investasi pendidikan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas berbasis hasil (*result-based accountability*).

Dalam konteks kebijakan pendidikan gratis (Anonim, 2011), tuntutan akuntabilitas semakin meningkat karena dana yang digunakan bersumber dari pajak masyarakat. Transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai bentuk subsidi pendidikan lainnya menjadi prasyarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendidikan.

Fattah (2004) mengemukakan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara fundamental mengubah pola pertanggungjawaban dalam pembiayaan pendidikan. Dengan MBS, sekolah mendapat otonomi yang lebih besar dalam mengelola anggaran, namun sekaligus dibebani tanggung jawab yang lebih besar pula untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada komite sekolah dan masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian, analisis, dan interpretasi berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, serta sumber referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dianalisis meliputi kajian tentang manajemen keuangan pendidikan, ekonomi pendidikan, akuntabilitas publik, manajemen berbasis sekolah, dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji isi literatur secara sistematis untuk menemukan konsep, pola, serta hubungan antarkomponen yang berkaitan dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan. Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) pengumpulan dan seleksi literatur yang relevan; (2) klasifikasi data berdasarkan tema-tema penelitian; (3) analisis dan interpretasi data sesuai dengan fokus kajian; serta (4) penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil sintesis berbagai sumber yang telah dianalisis. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi



sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai referensi yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai evaluasi pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan serta relevansinya dalam perspektif manajemen pendidikan Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Evaluasi Pengawasan Biaya Pendidikan

1. Kerangka Evaluasi Pengawasan

Evaluasi pengawasan biaya pendidikan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas mekanisme pengendalian yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian antara rencana anggaran (RKAS/RAPBS) dengan realisasi penggunaan dana, serta analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan jika ada.

Nasehatun (1999) menggambarkan siklus pengendalian anggaran yang terdiri dari empat tahapan yang saling berkesinambungan. Pertama, tahap penetapan standar di mana tujuan finansial dan operasional dinyatakan secara kuantitatif. Kedua, tahap pengukuran kinerja aktual yang membandingkan realisasi dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, tahap analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih antara rencana dan realisasi. Keempat, tahap tindakan korektif untuk mengembalikan kinerja ke jalur yang benar.

Harahap (1996) menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang komprehensif sebagai fondasi pengawasan yang efektif. Anggaran yang baik harus mencerminkan prioritas program, mempertimbangkan kemampuan sumber daya, dan realistis dalam target pencapaiannya. Anggaran yang tidak realistis justru akan mempersulit proses pengawasan karena akan selalu menimbulkan varians yang besar.

2. Instrumen dan Metode Pengawasan

Pengawasan biaya pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen dan metode. Danumihardja (2004) mengidentifikasi beberapa metode pengawasan yang lazim digunakan di lembaga pendidikan: pertama, audit internal yang dilakukan oleh tim internal sekolah; kedua, audit eksternal yang dilakukan oleh inspektorat atau badan pengawas independen; ketiga, review anggaran berkala yang dilakukan bersama komite sekolah; dan keempat, pemantauan lapangan untuk memverifikasi realisasi fisik dari penggunaan dana.

Parkinson dan Rustomji (1993) menekankan pentingnya kalkulasi biaya yang akurat sebagai basis pengawasan. Tanpa data biaya yang valid dan reliabel, proses pengawasan tidak akan mampu mengidentifikasi inefisiensi atau penyimpangan secara akurat. Oleh karena itu, sistem pencatatan keuangan yang tertib dan terstandar merupakan prasyarat mutlak bagi pengawasan yang efektif.

3. Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana

Evaluasi pengawasan biaya pendidikan tidak hanya mencakup aspek kepatuhan (compliance), tetapi juga harus menjangkau aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Murnane (2001) menjelaskan bahwa investasi pendidikan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.

Latchanna dan Hussein (2007) mengemukakan bahwa analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) dalam pendidikan merupakan alat yang berguna untuk menilai apakah investasi yang dilakukan telah menghasilkan nilai yang sepadan. Meskipun manfaat pendidikan tidak seluruhnya dapat dikuantifikasi secara finansial, pendekatan ini tetap memberikan kerangka yang berguna untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya.

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Biaya Pendidikan

1. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban biaya pendidikan harus dibangun di atas beberapa prinsip fundamental. Doyle (dalam Danumihardja, 2004) mengidentifikasi transparansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan sebagai empat pilar utama pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Laporan



keuangan yang tidak transparan atau tidak akurat akan mengundang ketidakpercayaan publik dan melemahkan legitimasi lembaga pendidikan.

Caldwell, Levacic, dan Ross (1999) menambahkan bahwa dalam sistem formula funding, pertanggungjawaban juga mencakup kewajiban untuk menunjukkan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi dana. Hal ini menuntut adanya sistem pelaporan yang terstandar dan mekanisme verifikasi yang dapat dipercaya.

2. Peran Komite Sekolah dalam Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Fattah (2004) secara khusus menekankan peran strategis dewan sekolah atau komite sekolah dalam kerangka MBS. Komite sekolah berfungsi sebagai representasi masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran dan menerima pertanggungjawaban dari kepala sekolah. Keberadaan komite sekolah yang aktif dan kritis merupakan salah satu indikator tata kelola sekolah yang baik (good school governance).

Dalam praktiknya, Danumihardja (2004) menemukan bahwa peran komite sekolah dalam pengawasan keuangan masih belum optimal di banyak sekolah. Beberapa faktor penghambat meliputi: kurangnya kapasitas anggota komite dalam memahami laporan keuangan, rendahnya frekuensi pertemuan formal antara sekolah dan komite, serta belum adanya mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur.

3. Pertanggungjawaban dalam Konteks Pendidikan Gratis

Kebijakan pendidikan gratis yang diimplementasikan melalui berbagai program bantuan pendidikan (Anonim, 2011) menghadirkan dimensi pertanggungjawaban yang lebih kompleks. Dana yang bersumber dari anggaran negara harus dikelola dengan standar akuntabilitas publik yang tinggi, termasuk kewajiban untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana kepada masyarakat.

Fiandi dan Junaidi (2022) menekankan bahwa diversifikasi sumber dana pendidikan, meskipun dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya, juga memperumit sistem pertanggungjawaban karena setiap sumber dana memiliki mekanisme pelaporan dan persyaratan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi.

C. Perspektif Manajemen Pendidikan Islam

1. Landasan Nilai dalam Pengelolaan Biaya Pendidikan

Manajemen pendidikan Islam memandang pengelolaan biaya pendidikan bukan sekadar persoalan teknis manajerial, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai Islam yang agung. Konsep amanah (trustworthiness) merupakan landasan fundamental yang harus dipegang oleh setiap pengelola keuangan di lembaga pendidikan Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang beriman harus menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya (QS. An-Nisa: 58).

Prinsip shura (musyawarah) dalam Islam sangat relevan dengan praktik pengawasan partisipatif dalam pembiayaan pendidikan. Pengambilan keputusan anggaran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya lebih demokratis, tetapi juga lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Anwar (2004) menekankan bahwa administrasi pendidikan yang efektif harus mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.

2. Integrasi Akuntabilitas Duniawi dan Ukhrawi

Salah satu keunikan manajemen pendidikan Islam dibandingkan manajemen konvensional adalah adanya dimensi pertanggungjawaban vertikal (kepada Allah SWT) di samping pertanggungjawaban horizontal (kepada sesama manusia). Kesadaran bahwa setiap pengelola dana pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT memberikan motivasi intrinsik yang kuat untuk bertindak jujur dan amanah.

Fattah (2000) menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi pendidikan Islam, efisiensi penggunaan sumber daya bukan hanya tuntutan rasionalitas ekonomi semata, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk tidak menyia-nyaikan nikmat Allah SWT. Konsep ini mendorong para pengelola untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan dana pendidikan.

3. Prinsip Keadilan dalam Alokasi Biaya Pendidikan

Islam sangat menekankan prinsip keadilan (adalah) dalam distribusi sumber daya. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, keadilan berarti bahwa alokasi dana harus mempertimbangkan



kebutuhan nyata setiap kelompok peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Caldwell, Levacic, dan Ross (1999) dalam konsep need-based resource allocation mereka secara tidak langsung sejalan dengan prinsip keadilan Islam ini.

Kebijakan pendidikan gratis yang bertujuan menghapus hambatan finansial dalam akses pendidikan (Anonim, 2011) merupakan implementasi nyata dari prinsip keadilan dalam pendidikan Islam. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana subsidi pendidikan ini merupakan kewajiban moral yang tidak dapat ditawar bagi para pengelola pendidikan Islam.

D. Model Evaluasi Pengawasan dan Pertanggungjawaban Terintegrasi

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur yang telah dibahas, dapat dirumuskan sebuah model evaluasi pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan yang terintegrasi. Model ini terdiri dari empat dimensi yang saling berkaitan:

Dimensi pertama adalah perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, yang menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan nyata sebagai dasar penyusunan anggaran. Harahap (1996) dan Caldwell et al. (1999) sama-sama menekankan bahwa anggaran yang baik harus mencerminkan prioritas berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar rutinitas administratif.

Dimensi kedua adalah mekanisme monitoring yang berkelanjutan, mencakup audit internal periodik, review anggaran bersama komite sekolah, dan pemantauan lapangan. Nasehatun (1999) mengemukakan bahwa monitoring yang efektif harus dilakukan secara teratur dan menggunakan indikator yang relevan.

Dimensi ketiga adalah sistem pelaporan yang transparan, yang mencakup laporan keuangan berkala, laporan capaian program, dan mekanisme diseminasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Doyle (dalam Danumihardja, 2004) menekankan bahwa transparansi pelaporan merupakan fondasi kepercayaan publik.

Dimensi keempat adalah evaluasi dampak dan nilai tambah, yang menilai apakah penggunaan dana telah menghasilkan perbaikan kualitas pendidikan yang nyata. Murnane (2001) mengingatkan bahwa evaluasi investasi pendidikan harus selalu dikaitkan dengan dampaknya terhadap hasil pembelajaran peserta didik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap literatur manajemen pembiayaan pendidikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Pertama, evaluasi pengawasan biaya pendidikan yang efektif memerlukan sistem yang holistik, mencakup perencanaan anggaran yang berbasis kebutuhan, monitoring yang berkelanjutan, dan mekanisme tindak lanjut yang responsif. Pengawasan yang hanya bersifat formalitas tanpa diikuti tindakan korektif tidak akan mampu mencegah inefisiensi dan penyimpangan.

Kedua, pertanggungjawaban biaya pendidikan tidak dapat dibatasi hanya pada pelaporan administratif kepada atasan, tetapi harus diperluas mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dalam konteks MBS, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat dalam menerima dan mengevaluasi pertanggungjawaban pengelola sekolah.

Ketiga, perspektif manajemen pendidikan Islam memberikan nilai tambah yang signifikan dengan mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dalam pengelolaan biaya pendidikan. Konsep amanah, shura, dan adalah tidak hanya memperkuat motivasi internal pengelola untuk bertindak jujur dan efisien, tetapi juga memberikan kerangka etis yang komprehensif bagi seluruh proses pengelolaan keuangan.

Keempat, diversifikasi sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dikemukakan Fiandi dan Junaidi (2022) memberikan potensi yang lebih besar bagi pengembangan lembaga pendidikan, namun sekaligus menuntut kapasitas manajerial yang lebih tinggi dalam pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.



Rekomendasi

Berdasarkan temuan kajian ini, direkomendasikan beberapa hal kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan biaya pendidikan:

Kepada kepala sekolah dan pengelola keuangan pendidikan, agar meningkatkan kapasitas teknis dalam penyusunan anggaran berbasis kebutuhan, menerapkan sistem pencatatan keuangan yang tertib dan terstandar, serta membangun budaya transparansi dalam pelaporan keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kepada komite sekolah, agar meningkatkan peran aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran sekolah, memperkuat kapasitas anggota dalam memahami laporan keuangan, dan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat sebagai representasi yang diwakilinya.

Kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan, agar memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sekolah, menyederhanakan mekanisme pelaporan tanpa mengurangi substansi akuntabilitas, serta menyediakan pelatihan yang memadai bagi bendahara sekolah.

Kepada akademisi dan peneliti, agar mengembangkan instrumen evaluasi pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan yang lebih komprehensif, termasuk indikator-indikator yang mengintegrasikan nilai-nilai manajemen pendidikan Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2011). Pendidikan Gratis: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Anwar, I. (2004). Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Caldwell, B.J., Levacic, R. & Ross, K.N. (1999). The Role of Formula Funding of Schools in Different Educational Policy Contexts. Dalam Ross, K.N. & Levacic, E. (Eds.), *Need-Based Resource Allocation in Education via Formula Funding of Schools* (hlm. 9-24). Paris: International Institute for Educational Planning, UNESCO.
- Danumihardja, M. (2004). Manajemen Keuangan Sekolah: Studi Manajemen Keuangan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Uhamka Press.
- Doyle, D. Pengendalian Biaya: Pedoman Strategis. Seri Manajemen. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Fattah, N. (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Penerbit Pustaka Bani Quraisy.
- Fiandi & Junaidi. (2022). Sumber-sumber Dana Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 10414-10421.
- Harahap, S.S. (1996). Budgeting: Peranggaran Perencanaan Lengkap untuk Membantu Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latchanna, G. & Hussein, J.O. (2007). *Economics of Education*. New Delhi: Discovery Publishing House.
- Murnane, R. (2001). *Evaluating Educational Investment*. Cambridge: Harvard Education Press.
- Nasehatun, A. (1999). *Budget & Control: Sistem Perencanaan dan Pengendalian Terpadu: Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Parkinson, C.N. & Rustomji, M.K. (1993). *Kalkulasi Biaya: Untuk Efisiensi dan Peningkatan Produktivitas*. Semarang: Dahara Prize.